



**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA
KELOLA
PERUMDA BPR TUAH
KARIMUN**

TAHUN 2024

2024



A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl. Pramuka No. 45 A Kec. Karimun Kab. Karimun
Nomor Telepon	0777-328277
Penjelasan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan prinsip-prinsip GCG telah dilakukan secara umum, namun masih terdapat kelemahan signifikan dalam beberapa aspek penting. 2. Struktur dan proses tata kelola sudah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya, terutama dalam fungsi pengawasan internal, manajemen risiko, atau dokumentasi keputusan. 3. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan GCG telah ada, namun pelaksanaan dan pengawasannya masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait pengendalian internal, transparansi informasi, dan manajemen konflik kepentingan. 4. Unit Kepatuhan dan Audit Internal telah berjalan, tetapi pelaporan, pemantauan tindak lanjut audit, serta penegakan kode etik belum optimal. 5. Belum seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan bebas dari intervensi pihak yang tidak berwenang, dan dalam beberapa kasus ditemukan indikasi kurangnya independensi atau dominasi pemilik.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	<p>Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Tuah karimun Tahun 2024 dengan hasil predikat komposit 3 (tiga) cukup Baik.</p> <p>Penjelasan predikat komposit 3 (tiga) :</p> <p>Perumda BPR Tuah Karimun dalam Memenuhi kondisi Pelaksanaan Tata Kelola belum sepenuhnya terpenuhi dalam struktur dan / atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata Kelola yang dilakukan dan ditunjukkan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata Kelola yang cukup baik.</p>

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : AZLAN, SE
	Nama : 2102012309790000
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan tanggungjawab Direksi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola Operasional BPR Secara Profesional dan Prudent 2. Menerapkan Tata Kelola yang Baik, Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. 3. Mewujudkan Kepatuhan terhadap Peraturan, Direksi bertanggung jawab atas pemenuhan seluruh kewajiban kepatuhan BPR terhadap ketentuan OJK, BI, dan peraturan lainnya.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menjaga Keberlangsungan Usaha, Direksi harus menjaga keberlanjutan usaha BPR dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang sehat dan realistis. 5. Pengelolaan Risiko, Direksi wajib menerapkan dan mengawasi sistem manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal. 6. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Sistem Pengendalian Intern, Memastikan bahwa fungsi audit internal, pengendalian internal, dan sistem informasi manajemen berjalan efektif dan independen. 7. Penyampaian Informasi kepada Dewan Komisaris dan OJK, Direksi wajib memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan OJK, termasuk informasi penting yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan atau operasional BPR. 8. Pertanggungjawaban Kolektif, Semua anggota Direksi bertanggung jawab secara kolektif atas seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil, kecuali bila ada perbedaan pendapat yang dinyatakan secara tertulis. 9. Menghindari Benturan Kepentingan, Direksi tidak boleh menyalahgunakan jabatan atau memiliki kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan bisnis. 10. Pengembangan SDM, Direksi bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha BPR. 												
2.	<table border="1"> <tr> <td>NIK</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tugas dan Tanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> </table>	NIK	:	-	Nama	:	-	Jabatan	:	-	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
NIK	:	-											
Nama	:	-											
Jabatan	:	-											
Tugas dan Tanggung Jawab	:	-											
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan PERUMDA BPR Tuah Karimun tahun 2024. 2. Direksi telah menerapkan implementasi SAK EP dengan perhitungan CKPN berdasarkan <i>Peer Group Data</i>. 												

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas	
1.	NIK	: 2102030406660003
	Nama	: DJUNAIDY, S.SOS.,M.SI
	Jabatan	: KOMISARIS UTAMA
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Pengawas adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komisaris Utama wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR 3. Komisaris Utama wajib mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan memastikan direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 4. Komisaris Utama wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan komisaris, OJK, dan lembaga lain. 5. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi dan menyakinkan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan. 6. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR. 7. Melakukan evaluasi pelaksanaan APU PPT sesuai dengan POJK APU PPT dan UU mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 8. Komisaris Utama memimpin semua kegiatan anggota dewan komisaris, menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, memimpin rapat Dewan Komisaris dan membina serta meningkatkan tugas para anggota Dewan komisaris. 9. Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS, pertanggungjawaban Dewan komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan komisaris, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan secara periodik/semester sesuai dengan hasil pengawasan Dewan komisaris terhadap realisasi RBB dan disampaikan paling lambat setelah Posisi Juni dan Desember. Laporan Pengawasan RBB memuat berbagai pendapat, evaluasi, saran dan usulan kepada RUPS. 10. Komisaris utama wajib menyampaikan laporan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
2.	NIK : 1471112206640001
	Nama : SYAHRUL
	Jabatan : Anggota Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan tanggung jawab Komisaris independen adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR 2. komisaris independen wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Komisaris independen wajib mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan memastikan direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 4. Komisaris independen wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan komisaris, OJK, dan lembaga lain. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi dan menyakinkan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR. Melakukan evaluasi pelaksanaan APU PPT sesuai dengan POJK APU PPT dan UU mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 5. Komisaris independen wajib membantu Komisaris utama dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh RUPS. 6. komisaris independen wajib melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris utama. 7. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS, pertanggungjawaban Dewan komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan komisaris, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan secara periodik/semester sesuai dengan hasil pengawasan Dewan komisaris terhadap realisasi RBB dan disampaikan paling lambat setelah Posisi Juni dan Desember. Laporan Pengawasan RBB memuat berbagai pendapat, evaluasi, saran dan usulan kepada RUPS. 8. Komisaris independen wajib menyampaikan laporan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
--	--

Rekomendasi kepada Direksi:

1. Dewan komisaris memberikan rekomendasi terhadap penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan PERUMDA BPR Tuah Karimun tahun 2024.
2. Dewan komisaris mengingatkan direksi agar melakukan penyesuaian komponen penghasilan direksi (kebijakan remunerasi).
3. Dewan komisaris juga mengarahkan agar direksi dapat meningkatkan kinerja untuk menjaga likuiditas BPR.
4. Dewan komisaris mengingatkan dan mengarahkan agar direksi segera melakukan persiapan implementasi SAK EP dan simulasi perhitungan CKPN dan rasio keuangan yang berpengaruh setelah penerapan SAK EP sebelum berlaku efektif 1 Januari 2025.

5. Dewan komisaris mengingatkan dan mengarahkan agar direksi dapat menyelesaikan Biaya Dibayar Dimuka yang menjadi temuan berulang dari Otoritas Jasa Keuangan dan mealporkannya kepada RUPS.
6. Dewan komisaris mengarahkan agar direksi dapat meningkatkan kinerja terutama meningkatkan pertumbuhan kredit dan dapat menyelesaikan rasio kredit bermasalah (NPL) yang semakin tinggi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.									
2.									
3.									

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan

			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	162,149,502	2	158,926,642
2.	Tunjangan	2	372,966,172	2	16,727,427
3.	Tantiem			1	27,879,045
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		535,115,674		203,533,114
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya				
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain				

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.28
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.24

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.57

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	15/10/2024	2	Evaluasi kinerja PERUMDA BPR Tuah Karimun tahun 2021-Sept 2024.
2.	16/10/2024	2	Rapat Pembahasan Pra-RUPS Tahun 2024.
3.	29/11/2024	2	Pembahasan Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Pembahasan Draft RBB Tahun 2025.
4.	30/11/2024	2	Pembahasan Draft final RBB tahun 2025.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	2102030406660003	DJUNAIIDY, S.SOS.,M.SI	V	-	100
2.	1471112206640001	SYAHRUL, SE.,MM	V		100

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								

Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	4/4/2024	Kegiatan Sosial	Partisipasi Kegiatan SEMBAKO (Hari Raya Idul Fitri)	Setda Kab. Karimun	-	10,750,000
2.	8/21/2024	Kegiatan Sosial	Partisipasi Kegiatan Gerak Jalan 17-an (HUT RI)	Pemerintah Daerah Kab. Karimun	-	500,000
3.	8/26/2024	Kegiatan Sosial	Partisipasi Kegiatan 17-an (HUT RI)	Pasar Maimun	-	1,000,000
4.	10/2/2024	Kegiatan Sosial	Partisipasi Kegiatan Hari Sumpah Pemuda	SMA Swasta Cahaya	-	500,000
5.	10/15/2024	Kegiatan Sosial	Partisipasi Kegiatan SSC (Smanlika Scout Competition)	SMA Negeri 5 Karimun	-	50,000

Karimun, 30 April 2025
 PERUMDA BPR TUAH KARIMUN



AZLAN, SE
 Direktur Utama




DJUNAIDY, S.SOS., M.SI
 Komisaris Utama